

**IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI VAKSINASI
COVID-19 DI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN)**

JURNAL

**BELLISAN ADETIO
19.11.244
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of the Covid-19 Vaccination Socialization Program in Palembang City (Case Study at the South Sumatra Provincial Health Service).

The method used in this research is qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation.

From the research results obtained in the implementation of the Covid-19 Vaccination Socialization Program policy at the South Sumatra Provincial Health Service, it is as good as it should be, this can be seen from the condition and size of the number of people who have been vaccinated against Covid-19. Where the group's interests and targets have been well-adjusted, which can provide several benefits for society as well as provide change and prevent infection of circulating viruses, the decision making made by the government has been good and appropriate in vaccinating people who are afraid of contracting the Covid-19 virus. , as well as the implementation of the outreach program carried out by the South Sumatra Provincial Health Service has gone well to reduce people's fear due to rumors circulating, which say that many people have died as a result of carrying out the Covid-19 vaccination.

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat telah menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dunia, hal ini tidak terlepas dari tingginya angka konfirmasi kasus Covid-19 di seluruh dunia serta jumlah korban meninggal akibat Covid-19. Akan tetapi, mengingat tingginya ancaman penyebaran Covid-19 di Indonesia,

telah menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, namun juga hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya dihadapkan pada ancaman terhadap isu kesehatan

yang menjadi fokus utamanya, namun situasi sosial dan ekonomi juga menjadi dua hal yang ikut terdampak secara serius (Valerisha & Putra 2020:21).

Coronavirus adalah anggota keluarga besar yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan dan manusia. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan peradaban sosial dalam kehidupan orang. Orang yang terpapar virus ini menunjukkan tanda-tanda gejala mulai dari flu biasa hingga gejala yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARSCOV2). Oleh karena itu, penyakit ini disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Ditunjuk (Organisasi Kesehatan Dunia / WHO, 2020).

Program Vaksin Covid-19 dalam ruang lingkup kebijakan public tersebut, jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang ada saat terjadi pandemic sangat besar. Ada yang pro dan kontra dengan keputusan pemerintah untuk memberikan vaksin covid-19. Masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi tentang pentingnya diberikan vaksin akan lebih cenderung menolak, sedangkan masyarakat yang sudah mengerti akan pentingnya diberikan vaksin tersebut akan dengan senang hati melakukan suntik vaksin gratis yang diberikan oleh pemerintah dan datang sendiri ke Kantor Kelurahan, Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.

Adanya kerangka kerja yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan program vaksin Covid-19 ke seluruh daerah di Indonesia dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian vaksin, berapa dana yang akan

digunakan, mempersiapkan pihak-pihak yang terlibat, strategi dan faktor waktu seperti berapa lama waktu pemerintah akan melaksanakan program vaksin tersebut ke seluruh daerah di Indonesia. Apabila dana dan vaksin yang tersedia dari pemerintah dapat mencukupi target vaksin di suatu daerah, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga Kesehatan yang akan memberikan vaksin serta panitia yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian vaksin memenuhi quota sesuai target, maka dapat dikatakan kerangka kerja yang telah ditentukan tersebut berhasil dilaksanakan.

Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid19 yaitu melalui program vaksinasi nasional untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan membangun kekebalan komunitas (*herd immunity*). Vaksin COVID-19 dalam uji klinis semuanya menunjukkan imunogenisitas yang menjanjikan dengan berbagai tingkat efektivitas perlindungan dan profil keamanan yang dapat diterima (Nugroho dan Hidayat 2021:57). Untuk menyikapi keadaan darurat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Mengacu pada target vaksinasi yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization / WHO*), pada tahun 2021 setidaknya 40% dari populasi penduduk harus sudah divaksinasi secara lengkap. Sementara untuk tahun 2022 ini target capaian vaksinasi sebanyak 70%. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan WHO.

Mengingat capaian target vaksinasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, termasuk yang berkaitan dengan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masing-masing daerah kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di tingkat kasus aktif nasional serta tingkat keterisian rumah sakit (*Bed Occupation Room* / BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70% (Imendagri Nomor 17 Tahun 2021).

Program vaksinasi tersebut juga merupakan salah satu langkah kebijakan pemerintah guna mempercepat penanganan Covid-19 sekaligus sebagai salah satu wujud tanggungjawab pemerintah dalam melindungi kesehatan warga negara. Hal ini diawali sejak penetapan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga Corona Virus Disease 2019 (Salsa Nabila, 2021:32). Dimana kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan program vaksinasi merupakan salah satu wujud perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental yang tercermin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan program vaksinasi Covid-19. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya penerbitan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 420/3169/3/2020 tentang antisipasi penyebaran Covid-19. Adapun tujuan dari penerbitan Surat

Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tersebut antara lain terlaksananya percepatan vaksinasi di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksananya sinergitas / keterpaduan pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kota Palembang serta tercapainya kekebalan kelompok (*herd immunity*) dengan cakupan minimal 75% merata di seluruh wilayah Kota Palembang.

Program vaksinasi ini tak sepenuhnya disambut dengan baik oleh sebagian kalangan masyarakat lainnya. ini menyebabkan terjadinya konflik diantara masyarakat yang sampai saat ini masih sering terjadi, banyak berita-berita yang mencul di berbagai platform media, baik media TV, Internet, media sosial maupun media-media lainnya yang memberitakan hal-hal yang tidak benar mengenai vaksinasi covid – 19. Ini memicu munculnya rasa ragu dan tidak percaya masyarakat terhadap program vaksinasi covid 19 sehingga mereka enggan untuk melakukan vaksinasi. Lalu apa saja yang menyebabkan fenomena ketidakpercayaan dan keraguan dimasyarakat ini muncul. Diantara penyebab tersebut berasal dari perspektif yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang melihat banyak berita, artikel, dan informasi lainnya mengenai vaksinasi seperti halnya vaksin itu tidak halal, banyak orang setelah melakukan vaksin malah meninggal, dan masih banyak berita lain yang tersebar diberbagai platformplatform berita atau artikel. hal – hal tersebut banyak muncul dalam pikiran masyarakat yang membuat mereka takut.

Dalam hal ini masyarakat masih kurang paham atau salah paham mengenai berbagai berita yang beredar, karena banyak juga berita-berita hoax

yang tersebar dan memenuhi platform berita yang membuat masyarakat semakin takut seperti berita yang dirilis oleh beberapa media yang merilis berita-berita hoax mengenai vaksin dan vaksinasi yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia, media berita tersebut seperti Kompas.com, Liputan6.com, serta CNBN Indonesia.

Dari data yang peneliti cari lewat media internet, banyak laman berita yang menyebarkan berita-berita palsu mengenai orang yang meninggal setelah divaksin. Dari laman web kompas.com peneliti menemukan sampai batas 2 bulan yang lalu berita meninggal karena vaksin ini mencapai 36 berita yang beredar.

Fenomena yang ditemukan penulis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu, banyak dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang masih belum percaya sepenuhnya mengenai vaksinasi, mereka masih sering menyangkal pada saat akan melakukan dan menerima vaksinasi, bahkan ada sebagian juga yang menolak untuk divaksin. Karena berita hoax yang beredar itulah yang membuat masyarakat masih meragukan vaksinasi. Bahkan ada juga masyarakat yang terang-terangan menolak dengan berkata “meskipun saya tidak vaksin, tubuh saya masih baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa”, “saya tidak mau vaksin, nanti badan saya sakit”, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang selalu muncul. Alasannya karena setelah melihat masyarakat yang mau divaksin yang pertama banyak masyarakat yang merasakan keluhan sakit, mulai dari mual, panas, tanggangnya sakit, sampai gangguan pencernaan. Karena itulah banyak masyarakat yang masih tidak mau divaksin.

Tidak hanya dari berita hoax tetapi juga dari apa yang masyarakat sendiri lihat dan dengar kalau di Provinsi Sumatera Selatan juga ada masyarakat yang meninggal karena virus Covid-19, jumlah orang yang meninggal karena positif Covid-19 pada Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang berjumlah 1.143 orang dan pemakamannya dengan menggunakan protokol covid-19. Sedangkan untuk masyarakat yang meninggal karena setelah melakukan vaksin ini tidak ada, hanya saja setelah melakukan vaksinasi mereka merasakan efek samping dari vaksin itu sendiri dan sesuai dengan daya tahan tubuh masing-masing masyarakat.

Kebutuhan atas pemahaman dari masyarakat akhirnya mereka menganggap bahwa berita yang dilihat dan didengar tersebut benar. Padahal sebenarnya dari pemaparan para penanggung jawab yang bersangkutan dan berdasarkan hasil dari tes dan pemeriksaan lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa kematian tersebut tidak diakibatkan oleh vaksin melainkan diakibatkan oleh penyakit bawaan yang di idap oleh pasien selama hidup mereka. Ini berarti berita-berita yang tersebar tersebut dinyatakan sebagai berita hoax dan tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)”**

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildaysky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan; adapun Schubert mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa.”

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:68) makna implementasi yaitu penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai, serta beberapa cara untuk mengorganisasikannya.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada hakikatnya, implementasi juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses penerapan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pemberdayaan dan hal lain secara rutin.

Van Meter dan Van Horn dalam Ekasari (2014:52) mengemukakan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Purwanto dalam Syahida (2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijaksanaan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya)
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan para pendapat tersebut diatas, penulis menyimpulkan implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan peraturan perundang-undang atau program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi dan institusi, maupun pemerintah khususnya yang berkaitan dengan negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

B. Program

Program adalah proses mendeskripsikan, menghimpun informasi/data serta penyajian informasi/keterangan kepada pengambil kesimpulan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap program tersebut, perlukah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan (Arikunto dan Jabar, 2009:78). Program adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan sketsa tentang keadaan suatu objek yang pelaksanaannya dengan terstruktur/sistematis, terancang berdasarkan orientasi pada tujuan yang terarah dan jelas (Musa, 2005:95). Program merupakan suatu unit kegiatan yang memiliki tujuan menghimpun keterangan/data tentang realisasi dari implementasi kebijakan, yang berkelanjutan pada suatu organisasi yang melibatkan beberapa kelompok individu dalam pembuatan keputusan (Ananda dan Rafida, 2017:69).

Program adalah suatu kegiatan untuk memeriksa sejauh mana kualitas kesuksesan kegiatan yang dirancang (Arikunto, 2005:43). Program kerap berkaitan dengan pembuatan kesimpulan/keputusan, dikarenakan hasilnya merupakan dasar untuk

mengukur suatu program dan bagaimana keputusannya (Ambiyar dan Muharika, 2019:39). Program merupakan proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai sebagai hasil dari rancangan yang menyokong pencapaian tujuan (Arikunto, 2004:27).

Program adalah evaluasi yang mengacu pada sebuah pokok yang menitikberatkan kepada pertanyaan pada fokus perhatian, pengumpulan informasi yang sesuai, selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan untuk aplikasi tujuan khusus (Fitzpatrick, et al., 2004:47). Sedangkan evaluation program sebagai cara melakukan identifikasi pertanyaan yang sesuai, data apa yang hendak dibutuhkan, bagaimana analisis data tersebut serta bagaimana data yang dikumpulkan akan dimanfaatkan (Wholey, 2010:88).

Berdasarkan teori-teori program menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa program adalah proses menghimpun informasi secara terstruktur, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan/keputusan sebagai bahan untuk mempertimbangkan program tersebut, perlukah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan (Adjadan, 2015:36). Model dalam program sosialisasi yang dipergunakan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program yaitu *goals-oriented* (berorientasi pada tujuan), *decision-oriented* (berorientasi pada keputusan), *transactional-oriented* (berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya), dan *research-oriented* (berorientasi pada pengaruh dan dampak program) (Daryanto, 2008:156).

Goals program menjadi fokus pembahasan dalam kajian yang dilakukan penulis. *Goals* evaluasi

program dalam dunia kependidikan meliputi delapan aspek, yaitu pengajaran, diagnosis (upaya perbaikan), hasil belajar, fungsi seleksi, penyuluhan (bimbingan), fungsi penempatan, penilaian kelembagaan, dan kurikulum. Proram dari *process approach* ialah untuk mengetahui ketercapaian tujuan sosialisasi dan upaya perbaikan serta pengarahan pelaksanaannya. Selanjutnya, kegiatan pendidikan ditinjau dari pendekatan kelembagaan ialah kegiatan yang meliputi perancangan, *design*, pembuatan program, *setting*, pelaksanaan pengawasan, dan penilaian.

Eksposisi program tersebut diambil kesimpulan program ialah suatu upaya menghimpun, merancang, menganalisis, dan mengolah data untuk merumuskan nilai, mutu, kegunaan, prestasi, manfaat dari suatu program, organisasi atau lembaga, kantor, dan sekolah serta lainnya yang selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan terhadap program tersebut, perlukah dibenahi, disudahi ataupun diteruskan. Implementasi evaluasi program pendidikan untuk memahami tingkat pencapaian program serempak dalam mempertanggung jawabkan program yang telah berproses serta menyampaikan keterangan/informasi kepada pengambil keputusan di fase perancangan/perencanaan (Lazwardi, 2017).

C. Sosialisasi

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting

di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo (2014:8) adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompokkelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan

sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

D. Vaksinasi Covid--19

Vaksinasi adalah langkah agar seseorang terhindar dari penyakit, terutama penyakit yang mematikan dengan cara menyuntikkan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia supaya memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I).

Dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19, vaksinasi covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Bukan hanya Indonesia namun banyak Negara lain juga telah berupaya melakukan vaksinasi covid-19, dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi *World Health*

Organization (WHO) dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) bahwa pembentukan kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

METODE PENELITIAN

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono,2019:2), menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikan hasilnya. Selanjutnya Creswell (dalam Sugiyono,2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu; cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2019:2).

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinisasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif objek dapat diteliti serta

digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan untuk melihat Implementasi Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dikutip dari Sugiyono (2016 : 81) bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 1. Observasi Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung tentang bagaimana program sosialisasi vaksinasi covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sesuai dengan indikator di dalam penelitian ini, data tersebut dapat digunakan untuk mendukung data yang didapat melalui hasil wawancara. 2. Wawancara mendalam Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terutama yang berkaitan dengan program sosialisasi covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (interview guide), agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Informan adalah orang yang akan diwawancarai oleh penulis untuk mengumpulkan data. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu”.

mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini penulis mengambil data yang merupakan pedoman, diperoleh dari catatan-catatan dan laporan dari instansi yang bersangkutan serta mempelajari literatur dari sumber keputusan yang berhubungan dengan penelitian ini

Implementasi Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai Implementasi Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang penulis lakukan pada dua konsep yaitu Implementasi dan Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Model implementasi menurut Merille S. Grindle, dimana indikatornya ada enam macam yaitu: Kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan.

Dari hasil indikator model implementasi tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepentingan dan Sasaran

Kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam pelaksanaannya

pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan distribusi dalam kebijakan Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu pelaksanaan penyelenggaraan Kebijakan Program Sosialisasi Vaksinasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis mengenai implementasi program sosialisasi vaksinasi covid-19 dalam kepentingan kelompok dan sasaran maka penulis dapat menyatakan bahwa Program Sosialisasi COVID-19. sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan, kemudian program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang takut akan terinfeksinya virus Covid-19 yang beredar.

b. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang bisa diperoleh dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan

permasalahan yang ada serta bermanfaat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 menginginkan perubahan yaitu memberikan kepercayaan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat belum mengetahui maraknya wabah virus Covid-19. Program Vaksinasi yang diharapkan mampu meminimalisir korban jiwa di Indonesia Khususnya Kota Palembang sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari terinfeksinya wabah tersebut

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan Program Vaksinasi dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan Program Vaksinasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah keputusan pada permasalahan pendistribusian Program Vaksinasi di Kota Palembang.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan Program Vaksinasi. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk Tenaga kesehatan yang dibantu oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang tugasnya mulai dari pendataan hingga pendistribusian terhadap masyarakat yang kurang percaya dalam keamanan vaksinasi Covid-19.

f. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai

tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Tabel 10

Data Kebijakan Vaksinasi Covid-19

NO	TERCAPAI	DATA TARGET	HASIL
1.	191.632.198	2.001.087	92.01%
2.	146.577.204	1.936.091	70.38%

2. Program Vaksinasi Covid-19

Program vaksinasi COVID-19 adalah upaya pemerintah atau lembaga kesehatan untuk menyediakan dan menyelenggarakan vaksinasi bagi populasi tertentu dengan tujuan untuk melindungi mereka dari infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Ada 3 Komponen dalam Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 sebagai berikut :

a. Penguasaan diri

Penguasaan diri merupakan keterampilan yang penting bagi para penyampai pesan dalam program sosialisasi, terutama saat menyampaikan informasi penting seperti vaksinasi Covid-19. Dengan memiliki penguasaan diri yang baik, pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih efektif diserap dan dipahami oleh audiens, sehingga program sosialisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik.

b. Nilai-nilai

Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi para penyelenggara program sosialisasi dalam menyusun, menyampaikan, dan mengelola program dengan etika dan integritas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program sosialisasi, diharapkan program dapat mencapai tujuan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

c. Peran-peran Sosial

Peran-peran sosial dalam program sosialisasi merujuk pada peran-peran yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam interaksi sosial dan partisipasi dalam program sosialisasi. Dalam konteks program sosialisasi, berbagai peran sosial dapat mempengaruhi dinamika program dan interaksi antara peserta.

Dalam program sosialisasi yang efektif, penting untuk mengenali peran-peran sosial ini dan berinteraksi dengan mereka secara kolaboratif. Pengenalan dan penghormatan terhadap peran sosial ini dapat meningkatkan partisipasi, penerimaan, dan efektivitas program sosialisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah baik sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari keadaan dan ukuran kondisi banyaknya masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19. Dimana dalam kepentingan kelompok dan sasaran sudah ditepatkan dengan baik, yang

dapat memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat serta memberikan perubahan dan pencegahan terinfeksi virus yang beredar, pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah sudah baik dan tepat dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang takut akan tertularnya virus covid-19, serta pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik untuk mengurangi rasa takut masyarakat akibat beredar yang beredar, yang mengatakan banyaknya orang yang meninggal akibat melakukan vaksinasi covid-19.

B. Saran

Setelah penulis membuat simpulan pada pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Program Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan harus diperbaiki lagi baik dari segi memberikan informasi kepada masyarakat, sosialisasi yang kurang optimal harus diperbaiki agar dalam waktu pelaksanaan program dapat diterima oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adjadan, S. 2015. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah* (Studi Evaluatif Pascadiklat di LPMP Provinsi Maluku Utara).

- Ambiyar & Muharika. D. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung: Alfabeta.
- Ananda, R. & Rafida, T. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Arikunto, S. 2005. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Charles r. dkk. 2014. *Handbook ilmu komunikasi*. Nusa media: Bandung.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Cogressional Quaerterly Inc.
- Fitzpatrick, J. L., James, R. S. & Blaine, R. W. 2004. *Program Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson Education Inc: Boston.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.
- Karsidi, Ravik. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*,. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT.Elek Media Komputindo.
- Purwanto. 2014. *Evaluasi Hasil belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cetakan Kedelapan Belas. Penerbit : Alfabeta,Bandung
- Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta:Rajawali Press
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH: Bandung.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Westra, Pariata., dkk. 1981. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jurnal.**
- Faisal Riza Dkk, 2020. *Strategi Komunikasi Puskesmas Terjun Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Palu

Nugroho, S.A. dan Hidayat I.N. 2021.
*Efektivitas Dan Keamanan
Vaksin Covid-19 : Studi
Referensi*, Jurnal Keperawatan.

Ultri Rahma Yanti DKK, 2019.
*Strategi Pemerintahan Nagari
Dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Pada
Program Vaksinasi Covid-19 di
Nagari Pamuatan Kecamatan
Kupitan Kabupaten Sijunjung.
Nagari Pamuatan.*

Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020).
Pandemi Global Covid-19 Dan

*Problematika Negara-Bangsa:
Transparansi Data Sebagai
Vaksin Socio-Digital*. Jurnal
Ilmiah Hubungan Internasional.

Sumber Internet.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnal/eksekutif/article/viewFile/2817/2368>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41843/3/Chapter%20I.pdf>